



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

== RENCANA KERJA TAHUN 2024 ==

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO



DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2023

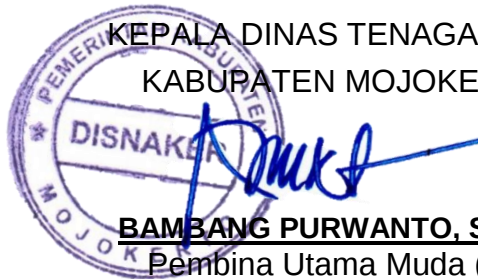
KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun. Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan aturan secara rinci berpedoman dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Rencana Kerja Tahun 2024 ini merupakan penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dan nantinya akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dimana terdapat 4 (empat) program yang terdiri dari 3 (Tiga Program Prioritas) dan 1 (satu) program pendukung.

Harapan kami semoga Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto ini benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif Tahun 2024.

Mojokerto, Juli 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO,

BAMBANG PURWANTO, SH., MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690521 199602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISI.....ii

BAB I PENDAHULUAN1

1.1 LATAR BELAKANG.....1

1.2 LANDASAN HUKUM2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....5

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....5

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU8

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD8

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....18

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH20

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD.....21

2.5 PENELAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT36

BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....37

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL37

3.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....37

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN.....40

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH52

BAB V PENUTUP.....64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 3 yaitu *“Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah”*, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja OPD (Rancangan akhir OPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Rancangan akhir OPD ini mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Rencana Kerja OPD dibahas pada forum OPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD. Renja OPD ditetapkan melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun $n+1$.

Berdasar Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto membuat rancangan akhir rencana kerja yang merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan sehingga memudahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara terukur. Rencana kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, maka dalam penyusunannya memerlukan data dan informasi yang akurat sebagai bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan.

Selain itu rencana kerja ini menjabarkan visi dan misi kepala daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dalam Pembangunan di Bidang Ketenagakerjaan yang efektif, efisien dan akuntabel maka perlu adanya rumusan tujuan yang jelas, faktual dan realistis.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

- Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679
 12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
22. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-

- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1)
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2021-2026;
33. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan rancangan akhir rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto:

a. Maksud :

1. menentukan sasaran indikator dan penetapan kinerja dalam bentuk penyusunan program kegiatan,
2. menentukan lokasi kegiatan dan menyusun indikator kinerja kegiatan
3. serta menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang, sehingga mampu menjawab tuntutan agar pembangunan di bidang ketenagakerjaan khususnya di Kabupaten Mojokerto lebih efektif, efisien, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Tujuan :

Tujuan disusunnya Rencana kerja adalah sebagai perwujudan dokumen perumusan, perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketenagakerjaan pada tahun N+1 sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto berdasarkan Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang rancangan akhir Perangkat Daerah, Proses penyusunan rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara RENJA PD dengan dokumen RKPD, RENSTRA PD, RENJA K/L dan RENJA PROVINSI, Tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya, Analisis Kinerja Pelayanan OPD dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan uraian tentang indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto pada Renja tahun lalu dan pencapaian target Renstra OPD bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan dalam Dokumen Renstra OPD. Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. pada umumnya dapat tercapai dengan baik, hal ini dapat dilihat dan disajikan pada tabel pencapaian kinerja program dan kegiatan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 1.1

RINCIAN CAPAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERSENTASE REALISASI TARGET	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			72,11 (BB)	86,75%
				1 INOVASI	
		PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		100%	97,64%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	93,33%
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	98,60%
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		100%	85,23%
			Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	100%	85,23%
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		100%	99,58%
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	99,58%
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		100%	97,03%
			Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	100%	96,66%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	99,84%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERSENTASE REALISASI TARGET	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN
			Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	100%	100%
			Penyediaan Bahan / Material	100%	90,06%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	100%	99,89%
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		100%	98,23%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	100%	95,50%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		100%	95,45%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	100%	97,02%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	100%	95,08%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	100%	95,05%
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			41,67%	81,14%
		PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI		92,31%	80,22%
			Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	91,67%	79,28%
			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	100%	98,64%
		PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA		100%	91,73%
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100%	91,73%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERSENTASE REALISASI TARGET	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN
		KONSULTANSI PRODUKTIVITAS PADA PERUSAHAAN KECIL		100%	89,64%
			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	100%	89,64%
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			102,49%	91,44%
		PELAYANAN ANTARKERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	80,94%
			Pelayanan Antar Kerja	100%	78,22%
			Perluasan Kesempatan Kerja	100%	90,76%
		PENGLOLAAN INFORMASI PASAR KERJA		100%	100%
			Job Fair/ Bursa Kerja	100%	100%
		PELINDUNGAN PMI (PRA DAN PURNA PENEMPATAN) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	99,88%
			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	100%	99,88%
		PENERBITAN PERPANJANGAN IMTA YANG LOKASI KERJA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%
			Koordinasi Dan Sinkronisasi Perpanjangan Imta Yang Lokasi Kerja Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			100%	97,85%
				55,02%	
		PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	97,85%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERSENTASE REALISASI TARGET	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	97,26%
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	100%	97,00%
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100%	98,57%

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program ini terdiri dari 5 (lima) Kegiatan dan 15 (lima belas) Sub Kegiatan, untuk pencapaian kinerja sebesar 72,11%, sementara persentase realisasi anggaran sebesar 86,75%

2. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Indikator dari program ini adalah persentase peningkatan pencari kerja yang dilatih. Pada tahun 2022 realisasi capaian keuangan sebesar 81,14% dan realisasi capaian kinerja sebesar 41,67% dari target RKPD 25%. Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan.

3. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Indikator dari program penempatan tenaga kerja adalah persentase peningkatan jejaring informasi lowongan kerja pada perusahaan. Pada tahun 2022 realisasi capaian keuangan sebesar 91,44%. Sementara untuk capaian kinerja sebesar 102,49% dari target RKPD 70%. Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan.

4. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Indikator program hubungan dari program hubungan industrial adalah persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dan Persentase perusahaan yang dimonitor. Pada tahun 2022 realisasi capaian keuangan sebesar 97,85% mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 2021 sebesar 84,20%. Untuk realisasi kinerja dari indikator program yaitu Persentase Kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan sebesar 100% dari target RKPD 80% dan Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial sebesar 55,02% dari target RKPD sebesar 55%.. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan.

Selanjutnya pencapaian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto sebagaimana terdapat pada Tabel TC-29.

TABEL TC-29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022
KABUPATEN MOJOKERTO

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA KAB. MOJOKERTO

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (N-3/2021)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N- 1) 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/ 2022)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/2022)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
1					URUSAN WAJIB									
1	14				KETENAGAKERJAAN									
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	83,90	86,44	83,90	72,11	86%	84,40	24295%	290%
						JUMLAH INOVASI YANG TERINTERNALISASI DAN TERSOSIALISASI SERTA BERKELANJUTAN	1 Inovasi	2	1	1	100%	2 Inovasi	5	500%
2	07	01	2.01		perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target	100 %	100	100	100	100 %	100 %	300	3,00
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	5	2	2	2 %	2 dokumen	9	4,50
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4	2	2	100 %	4 laporan	10	2,50
2	07	01	2.02		administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90 %	90	90	90	100 %	90 %	270	3,00
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 Orang/bln	31	36	30	83 %	36 Orang/bln	97	2,69
2	07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan admistrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	12	0	0	0 %	0 dokumen	12	1,00
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja	75 %	100	75	75	100 %	75 %	250	3,33

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (N-3/2021)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N- 1) 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
								TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/ 2022)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/2022)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2				3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	1	1	100 %	0 Paket	2	2,00
2	07	01	2.06		administrasi umum perangkat daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	100 %	100	100	100 %	100 %	300	3,00
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket	17	7	100 %	6 Paket	30	5,00
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 Paket	18	12	100 %	5 Paket	35	7,00
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	13 Paket	25	13	100 %	13 Paket	51	3,92
2	07	01	2.06	07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan/ material yang disediakan	1 Paket	2	1	100 %	1 Paket	4	4,00
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 laporan	200	100	100 %	100 laporan	400	4,00
2	07	01	2.08		penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100 %	100	100	100 %	100 %	300	3,00
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	48	12	100 %	12 laporan	72	6,00
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	48	12	100 %	12 laporan	72	6,00
2	07	01	2.09		pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah dalam keadaan baik	100 %	56	25	100 %	100 %	181	1,81
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 unit	6	6	100 %	6 unit	18	3,00

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (N-3/2021)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N- 1) 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/ 2022)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/2022)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	2	1	1	100 %	1 unit	4	4,00
2	07	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	30 unit	48	18	18	100 %	30 unit	96	3,20
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE PESERTA PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI	25 %	55	25	41,67	167%	25%	9692%	388%
2	07	03	2.01		pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi	144 orang	276	208	176	85 %	144 orang	596	4,14
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	128 orang	276	192	176	92 %	128 orang	580	4,53
					Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka optimaslisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	16 Lembaga	32	16	16	100 %	16 Lembaga	64	4,00
2	07	03	2.02		pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina	30 Lembaga	55	30	30	100 %	30 Lembaga	115	3,83
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	30 Lembaga	55	30	30	100 %	30 Lembaga	115	3,83
					Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan yang diberikan konsultasi produktivitas	4 perusahaan	0	4	4	100 %	4 perusahaan	8	2,00
					Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	4 perusahaan	0	4	4	100 %	4 perusahaan	8	2,00
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE INFORMASI LOWONGAN KERJA YANG TERPENUHI	70 %	71,74	70	71,74	102%	72%	14420%	206%

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (N-3/2021)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N- 1) 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/ 2022)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/2022)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
2	07	04	2.01		pelayanan antarkerja di daerah kabupaten/kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang tercapai sesuai target	100 %	30	100	100	100 %	100 %	230	2,30
2	07	04	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain lain untuk Peningkatan Kompetensi	1 orang	1	0	0	0 %	0 orang	1	1,00
2	07	04	2.01	02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	3 orang	6	3	3	100 %	3 orang	12	4,00
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	20 orang	30	10	10	100 %	10 orang	50	2,50
2	07	04	2.03		pengelolaan informasi pasar kerja	Persentase Fasilitas pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target	100 %	50	10	10	100 %	100 %	160	1,60
2	07	04	2.03	03	Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	45 orang	50	10	10	100 %	45 orang	105	2,33
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI	20	0	20	20	100 %	20	40	2,00
2	07	04	2.04		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/ PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	20 orang	0	20	20	100 %	20 orang	40	2,00
2	07	04	2.05		penerbitan perpanjangan imta yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah orang peserta yang diberikan fasilitas, koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA	50 orang	80	30	30	100 %	20	130	2,60
2	07	04	2.05	01	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perpanjangan Imta Yang Lokasi Kerja Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Peserta Yang Diberikan Fasilitas, Koordinasi Dan Sinkronisasi Perpanjangan Imta	50 orang	80	30	30	100 %	20 orang	130	2,60

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (N-3/2021)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N- 1) 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/ 2022)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/2022)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	80 %	95	80	100,00	125%	80%	19580%	245%
						Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial	55 %	0	55	55,02	100%	56%	55,58	101%
2	07	05	2.02		pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target	100 %	8	100	100	100 %	100 %	208	2,08
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	4 Perkara	8	4	4	100 %	4 Perkara	16	4,00
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	10 Perkara	31	10	10	100 %	10 Perkara	51	5,10
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	1	1	1	100 %	1 Lembaga	3	3,00
2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	200 orang	285	85	85	100 %	160 orang	530	2,65

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bahwa kinerja pelayanan di Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Indikator Kinerja yang telah dirumuskan terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja utama, antara lain:

1. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja;
2. Persentase Peserta Pelatihan Yang Berkualitas Dan Kompeten;
3. Persentase tingkat perselisihan hubungan industrial di perusahaan;
4. Persentase Perusahaan Yang Mengikutsertakan Pekerja dalam Jaminan Sosial.

Target dan realisasi pencapaian dari 4 (empat) indikator kinerja utama dan Indikator kinerja individu sebagaimana terdapat pada Tabel TC-30.

TABEL TC-30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	INDIKATOR	SPM STANDAR / OPERASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)											
1	PERSENTASE PESERTA PELATIHAN YANG BERKUALITAS DAN KOMPETEN			85%	85%	85%	87%	85,20	85,06	85%	87%	Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
2	PERSENTASE PENYERAPAN TENAGA KERJA			82%	82%	84%	84%	82,09	82,1	84%	84%	Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
3	PERSENTASE TINGKAT PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PERUSAHAAN			6%	6%	5%	5%	2,25	2,15	5%	5%	Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
4	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENGIKUTSERTAKAN PEKERJA DALAM JAMINAN SOSIAL			50%	51%	51%	52%	54,72	55,47	51%	52%	Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)											
1	PERSENTASE PESERTA PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI			20%	25%	25%	30%	28,07	41,67	25%	30%	Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
2	PERSENTASE INFORMASI LOWONGAN KERJA YANG TERPENUHI			70%	70%	72%	72%	70,27	71,74	72%	72%	Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
3	PERSENTASE PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DISELESAIKAN			80%	80%	80%	80%	80,95	100	80%	80%	Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
4	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG TERDAFTAR JAMINAN SOSIAL			55%	55%	56%	56%	55,38	55,02	56%	56%	Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
5	PERSENTASE PROG DAN KEGIATAN YANG MENGACU PERENCANAAN TENAGA KERJA			100%	100%	100%	100%	100	100	100%	100%	Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bahwa isu-isu penting ketenagakerjaan yang mempengaruhi tingkat kinerja pelayanan di Dinas Tenaga Kerja diantaranya sebagai berikut:

NO	ISU -ISU	KENDALA DAN TANTANGAN	REKOMENDASI
1	Masih tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);	Tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih berada di bawah target yang dicanangkan yaitu 3,45%, sementara pencapaian angka penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,68%. Salah satu faktor penyebabnya adalah banyaknya penduduk usia angkatan kerja yang belum mempunyai keterampilan atau kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di dunia industri dan wirausaha, sehingga sulit bersaing di pasar bebas baik di level lokal/ daerah dan luar Daerah serta kekurangsiapan menghadapi era industri 4.0	Bahwa perlunya Pelatihan yang berbasis ketrampilan dan sertifikasi dalam berbagai sektor usaha terhadap pencari kerja yang dengan bentuk uji kompetensi agar pencari kerja/ tenaga kerja tersebut mampu bersaing di level lokal/ daerah dan luar daerah khususnya kesiapan dalam menghadapi era industri 4.0. Selain itu meningkatkan penyuluhan bursa kerja serta informasi kerja ke dalam bentuk bursa kerja serta mengadakan pembinaan serta perluasan kesempatan kerja dengan berkoordinasi dengan para perusahaan agar dapat membuka sektor pekerjaan baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja secara optimal
2	Lemahnya Perlindungan dan fasilitasi Kesejahteraan Tenaga Kerja di perusahaan	- Masih banyaknya perusahaan-perusahaan di wilayah kabupaten Mojokerto yang belum melaksanakan norma ketenagakerjaan yang baik dan benar termasuk penyediaan sarana dan prasarana keselamatan kerja K3 yang belum merata di perusahaan di wilayah Kabupaten Mojokerto; - Minimnya angka Tenaga Kerja yang diikut sertakan ke dalam Program Jaminan Sosial (Cth. BPJS) Ketenagakerjaan sebagai fasilitas wajib dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja;	- Bahwa perlu dimaksimalkan pembinaan maupun sosialisasi penerapan norma kerja, sosialisasi penerapan sarana dan prasarana keselamatan kerja (K3) di perusahaan dalam bentuk monitoring secara langsung dan berkala sebagai sarana hubungan industrial untuk menciptakan kondisi hubungan industrial yang harmonis dan dinamis di wilayah Kabupaten Mojokerto; - Bahwa perlu dimaksimalkan pembinaan maupun sosialisasi agar perusahaan diwilayah Kabupaten Mojokerto mengikutsertakan seluruh pekerjaanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk preventif secara langsung untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk menciptakan ketenangan dan kenyamanan dalam bekerja bagi pekerja di tempat kerjanya;
3	tingginya resiko Perselisihan Hubungan Industrial di	Tingginya angka Perselisihan Hubungan Industrial antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja;	Bahwa dengan banyaknya faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan hubungan industrial yang terjadi di wilayah Kabupaten Mojokerto sebagai

NO	ISU -ISU	KENDALA DAN TANTANGAN	REKOMENDASI
	wilayah Kabupaten Mojokerto		contoh isu yang paling banyak terjadi adalah tingginya angka Upah Minimum Kerja, sehingga banyak perusahaan yang mencoba untuk bertahan atau survive dengan cara mengurangi jumlah karyawan maka pemutusan hubungan kerja massal atau penutupan perusahaan sebagai cara yang terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak pengusaha agar dapat terus menjalankan perusahaannya tidak dapat terhindarkan lagi. Maka Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto dalam hal ini akan mengupayakan secara maksimal pendekatan secara sosialisasi maupun pembinaan hubungan industrial dalam bentuk klasikal atau ke perusahaan agar setiap perselisihan yang terjadi dapat terselesaikan di tingkat perusahaan secara bipartit
4	Lemahnya perlindungan dan fasilitasi terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Lemahnya perlindungan dan fasilitasi terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Perlunya pembinaan dan monitoring secara berkelanjutan terhadap perlindungan dan fasilitasi tCalon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari proses dan tata cara pemberangkatan, selama bekerja dan setelah hubungan kerja berakhir (pemulangan)
5	Kurangnya Animo Masyarakat terhadap Fasilitasi Transmigrasi	Fasilitasi transmigrasi masih belum dijadikan solusi peningkatan kesejahteraan bagi masy. Mojokerto	1. terbatasnya kuota calon transmigran; 2. Kurangnya sosialisasi dan pembinaan ke masyarakat terhadap fasilitasi transmigrasi

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

Review Rancangan akhir RKPD dengan membandingkan hasil analisis kebutuhan riil Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, pelaksanaan reviu RKPD dengan analisis rencana kerja kebutuhan OPD masih disamakan, mengingat pada waktu penyusunan rencana awal rencana kerja ini masih belum diterbitkan dokumen RKPD dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto. Reviu ini dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel TC-31.

TABEL TC-31
REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					
	KETENAGAKERJAAN					KETENAGAKERJAAN					
01.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	KAB. MOJOKERTO	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,90 (A)	4.894.574.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	KAB. MOJOKERTO	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,90 (A)	4.894.574.000	
			Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	1 Inovasi				Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	1 Inovasi		
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target	100%	17.500.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target	100%	17.500.000	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.500.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Dokumen Rencana Kerja APBD			1 dokumen	3.750.000	Dokumen Rencana Kerja APBD			1 dokumen	3.750.000	

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dokumen Rencana Kerja PAPBD			1 dokumen	3.750.000	Dokumen Rencana Kerja PAPBD			1 dokumen	3.750.000	
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Penyusunan Dokumen Evaluasi tiap Tribulan			4 dokumen	3.380.000	Penyusunan Dokumen Evaluasi tiap Tribulan			4 dokumen	3.380.000	
	Penyusunan Dokumen LKjIP			dokumen	3.350.000	Penyusunan Dokumen LKjIP			dokumen	3.350.000	
	Penyusunan Dokumen SAKIP			1 dokumen	3.270.000	Penyusunan Dokumen SAKIP			1 dokumen	3.270.000	
	Peningkatan kapasitas pengelolaan, ketersediaan data ketenagakerjaan dan kinerja OPD			1 kegiatan	-	Peningkatan kapasitas pengelolaan, ketersediaan data ketenagakerjaan dan kinerja OPD			1 kegiatan	-	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	4.332.914.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	4.332.914.000	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 Orang/bln	4.332.914.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 Orang/bln	4.332.914.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN			36 Org/bln	2.149.736.000	Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN			36 Org/bln	2.149.736.000	
	Tambahan Penghasilan ASN (TPP)			36 Org/bln	1.736.288.400	Tambahan Penghasilan ASN (TPP)			36 Org/bln	1.736.288.400	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya ASN			36 Org/bln	88.740.000	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya ASN			36 Org/bln	88.740.000	

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Non ASN seluruh OPD dan Kecamatan			5527 Org/bln (12 bln)	358.149.600	Pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Non ASN seluruh OPD dan Kecamatan			5527 Org/bln (12 bln)	358.149.600	
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	-- dokumen	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	-- dokumen	-	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			-- dokumen	-	Pembiayaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			-- dokumen	-	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja	75%	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja	75%	-	
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	0 paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	0 paket	-	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Pengadaan Pakaian Dinas			0 paket	-	Pembiayaan Pengadaan Pakaian Dinas			0 paket	-	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	100%	128.160.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	100%	128.160.000	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 Paket	50.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembiayaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7 paket	50.000.000	Pembiayaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7 paket	50.000.000	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	7 paket	8.600.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	7 paket	8.600.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat			7 paket	8.600.000	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat			7 paket	8.600.000	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	13 paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	13 paket	20.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Barang Cetak dan Penggandaan			13 paket	20.000.000	Pembiayaan Barang Cetak dan Penggandaan			13 paket	20.000.000	
1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan / Material		Jumlah paket bahan/ material yang disediakan	1 paket	16.960.000	Penyediaan Bahan / Material		Jumlah paket bahan/ material yang disediakan	1 paket	16.960.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan bahan/ material ATK			1 paket	16.960.000	Pembiayaan bahan/ material ATK			1 paket	16.960.000	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 laporan	32.600.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 laporan	32.600.000	

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Rapat Perjalanan Dinas			100 laporan	32.600.000	Pembiayaan Rapat Perjalanan Dinas			100 laporan	32.600.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100%	196.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100%	196.000.000	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	70.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	70.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Jasa Komunikasi			12 bulan	6.218.806	Pembiayaan Jasa Komunikasi			12 bulan	6.218.806	
	Pembiayaan Jasa Air				-	Pembiayaan Jasa Air				-	
	Pembiayaan Jasa Listrik			12 bulan	63.781.194	Pembiayaan Jasa Listrik			12 bulan	63.781.194	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	126.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	126.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Non ASN)			12 laporan	126.000.000	Pembiayaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Non ASN)			12 laporan	126.000.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik	100%	220.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik	100%	220.000.000	

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	55.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	55.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor			6 Unit	50.000.000	Pembiayaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor			6 Unit	50.000.000	
	Pembiayaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Kantor			6 Unit	5.000.000	Pembiayaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Kantor			6 Unit	5.000.000	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Rehabilitasi gedung kantor			1 Unit	150.000.000	Pembiayaan Rehabilitasi gedung kantor			1 Unit	150.000.000	
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	18 Unit	15.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	18 Unit	15.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor			18 Unit	15.000.000	Pembiayaan Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor			18 Unit	15.000.000	

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	KAB. MOJOKERTO	Persentase program dan kegiatan yang mengacu perencanaan tenaga kerja	100%	-	Program Perencanaan Tenaga Kerja	KAB. MOJOKERTO	Persentase program dan kegiatan yang mengacu perencanaan tenaga kerja	100%	-	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	0 dokumen	-	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	0 dokumen	-	
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	0 dokumen	-	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	0 dokumen	-	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja			0 dokumen	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja			0 dokumen	-	
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	KAB. MOJOKERTO	Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	30%	897.700.000	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	KAB. MOJOKERTO	Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	30%	897.700.000	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi	128 Orang	857.700.000	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi	128 Orang	857.700.000	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	128 orang	857.700.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	128 orang	857.700.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pelatihan dan sertifikasi Komputer (K)			16 Orang	117.700.000	1 Pelatihan dan sertifikasi Komputer (K)			16 Orang	117.700.000	

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelatihan dan Sertifikasi Barista (K)			16 Orang	135.000.000	2 Pelatihan dan Sertifikasi Barista (K)			16 Orang	135.000.000	
	Pelatihan dan Sertifikasi Las (K)			16 Orang	65.000.000	3 Pelatihan dan Sertifikasi Las (K)			16 Orang	65.000.000	
	Pelatihan dan sertifikasi Menjahit (K)			16 Orang	120.000.000	4 Pelatihan dan sertifikasi cleaning service (K)			16 Orang	120.000.000	
	Pelatihan dan sertifikasi teknisi AC (K)			16 Orang	120.000.000	5 Pelatihan dan sertifikasi Operator Alat Berat			16 Orang	120.000.000	
	(DBHCHT)					(DBHCHT)					
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pelatihan dan Sertifikasi Tata Rias (DBHCHT) (K)			16 Orang	100.000.000	Pelatihan dan Sertifikasi Receptionist (DBHCHT) (K)			16 Orang	100.000.000	
	Pelatihan dan Sertifikasi Teknisi Sepeda Motor (DBHCHT) (K)			16 Orang	100.000.000	Pelatihan dan sertifikasi Pemandu wisata (DBHCHT) (K)			16 Orang	100.000.000	
	Pelatihan dan sertifikasi Pemijatan Refleksi (Reflexology) (DBHCHT) (K)			16 Orang	100.000.000	Pelatihan dan sertifikasi Pemijatan Refleksi (Reflexology) (DBHCHT) (K)			16 Orang	100.000.000	
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka optimaslisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	0 Lembaga	-	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka optimaslisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	0 Lembaga	-	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pelatihan dan sertifikasi metodologi Instruktur LPK			0 Lembaga	-	Pelatihan dan sertifikasi metodologi Instruktur LPK			0 Lembaga	-	

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina	30 lembaga	40.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina	30 lembaga	40.000.000	
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	30 lembaga	40.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	30 lembaga	40.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			15 LPK	20.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			15 LPK	20.000.000	
	Pembinaan Pemagangan dalam Negeri			15 Perusahaan	20.000.000	Pembinaan Pemagangan dalam Negeri			15 Perusahaan	20.000.000	
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan yang diberikan konsultasi produktivitas	4 perusahaan	-	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan yang diberikan konsultasi produktivitas	4 perusahaan	-	
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	4 perusahaan	-	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	4 perusahaan	-	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Konsultasi Produktivitas Perusahaan Kecil			4 perusahaan	-	Konsultasi Produktivitas Perusahaan Kecil			4 perusahaan	-	
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	KAB. MOJOKERTO	Persentase Informasi Lowongan Kerja yang Terpenuhi	72%	340.000.000	Program Penempatan Tenaga Kerja	KAB. MOJOKERTO	Persentase Informasi Lowongan Kerja yang Terpenuhi	72%	340.000.000	
2.07.04.2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Fasilitas Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang tercapai sesuai target	100%	115.000.000	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Fasilitas Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang tercapai sesuai target	100%	115.000.000	

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan Antar Kerja		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	1 Orang	90.000.000	Pelayanan Antar Kerja		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	1 Orang	90.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Fasilitasi Transmigrasi			1 Orang	90.000.000	Fasilitasi Transmigrasi			1 Orang	90.000.000	
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	60 Orang	25.000.000	Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	30 Orang	25.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)			60 Orang	25.000.000	Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)			30 Orang	25.000.000	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase Fasilitasi pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target	100%	175.000.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase Fasilitasi pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target	100%	175.000.000	
2.07.04.2.03.0003	Job Fair / Bursa Kerja		Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	50 Orang	175.000.000	Job Fair / Bursa Kerja		Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	50 Orang	175.000.000	

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Job Fair			40 stand	175.000.000	Job Fair			40 stand	175.000.000	Berubah volume target rincian
	Penyuluhan Informasi Bursa Kerja				-	Penyuluhan Informasi Bursa Kerja				-	
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI	20 Orang	50.000.000	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI	20 Orang	50.000.000	
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/ PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	20 Orang	50.000.000	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/ PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	20 Orang	50.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembinaan Calon PMI (Pekerja Migran Indonesia)			20 Orang	50.000.000	Pembinaan Calon PMI (Pekerja Migran Indonesia)			20 Orang	50.000.000	
TIDAK ADA DI KEPMENDAGRI TERBARU	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah orang peserta yang diberikan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA	0	-	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah orang peserta yang diberikan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA	0	-	
TIDAK ADA DI KEPMENDAGRI TERBARU	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Orang Peserta yang Diberikan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA	0	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Orang Peserta yang Diberikan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA	0	-	

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pengembangan kemampuan dan ketrampilan personalia dan pendamping TKA			0	-	Pengembangan kemampuan dan ketrampilan personalia dan pendamping TKA			0	-	
2.07.05	Program Hubungan Industrial	KAB. MOJOKERTO	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	80%	3.221.192.000	Program Hubungan Industrial	KAB. MOJOKERTO	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	80%	3.221.192.000	
		KAB. MOJOKERTO	Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial	56%			KAB. MOJOKERTO	Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial	56%		
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota		Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target	100%	3.221.192.000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota		Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target	100%	3.221.192.000	
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Perselisihan yang dicegah	4 Perkara	180.000.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Perselisihan yang dicegah	4 Perkara	180.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Sosialisasi Upah Minimum Kab. Mojokerto			60 Orang	30.000.000	Sosialisasi Upah Minimum Kab. Mojokerto			60 Orang	30.000.000	

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan syarat kerja dan sistem outsourcing			30 Orang	50.000.000	Pembinaan syarat kerja dan sistem outsourcing			30 Orang	50.000.000	
	Harmonisasi Kelembagaan Hubungan Industrial			30 Orang	50.000.000	Harmonisasi Kelembagaan Hubungan Industrial			30 Orang	50.000.000	
	Peningkatan Kinerja Dewan Pengupahan			3 Kegiatan	50.000.000	Peningkatan Kinerja Dewan Pengupahan			3 Kegiatan	50.000.000	
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	10 Perkara	25.000.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	10 Perkara	25.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial			10 Perkara	25.000.000	Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial			10 Perkara	25.000.000	
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	45.000.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	45.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit			2 Kegiatan	45.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit			2 Kegiatan	45.000.000	
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	27970 Orang	2.971.192.000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	27970 Orang	2.971.192.000	

KODE	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Monitoring dan sosialisasi penggunaan pekerja perempuan dan anak			50 Orang	35.000.000	Monitoring dan sosialisasi penggunaan pekerja perempuan dan anak			50 Orang	35.000.000	
	Peningkatan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja			50 Orang	30.000.000	Peningkatan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja			50 Orang	30.000.000	
	Monitoring perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan			80 Orang	80.000.000	Monitoring perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan			80 Orang	80.000.000	
	Monitoring sarana dan prasarana di perusahaan			50 Orang	30.000.000	Monitoring sarana dan prasarana di perusahaan			50 Orang	30.000.000	
	Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan untuk petani tembakau dan Pekerja Rentan lainnya Melalui Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)			27740 Orang	2.796.192.000	Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan untuk petani tembakau dan Pekerja Rentan lainnya Melalui Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)			27740 Orang	2.796.192.000	Sesuai SE Gubernur Jawa Timur
	JUMLAH				9.353.466.000	JUMLAH				9.353.466.000	

2.5 PENELAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Bahwa kajian dalam penelaan usulan program dan kegiatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja berpedoman kepada Program-program Nasional dan prioritas kebutuhan masyarakat wilayah Kabupaten Mojokerto, dimana dapat dilihat pada Tabel TC-32

TABEL TC-32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2024 KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 – 2026, maka diperoleh hasil telaah sebagai berikut:

- **Visi**
Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong
- **Misi**
Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan
- **Tujuan**
Meningkatkan pedayagunaan tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja serta sebagai upaya menurunkan pengangguran
- **Sasaran**
 1. Meningkatnya kualitas produktivitas dan kompetensi tenaga kerja;
 2. Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
 3. Meningkatnya efektivitas pembinaan dan mediasi hubungan industrial;
 4. Meningkatnya efektifitas pengawasan di bidang norma ketenagakerjaan;
 5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan kebijakan prioritas nasional tersebut maka disusun program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 antara lain:

1. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
2. Program penempatan tenaga kerja
3. Program hubungan industrial

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka untuk mendukung visi dan misi kepala daerah, Dinas Tenaga Kerja Melaksanakan Misi Ke 2 “**Membangun Kemandirian Ekonomi**

Berdimensi Kerakyatan". Sementara Tujuannya adalah **"Penurunan Angka Pengangguran"** dan mempunyai 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

- 1. Meningkatnya kualitas tenaga kerja serta penciptaan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja;*
- 2. Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan kondusif serta optimalisasi perlindungan ketenagakerjaan*

Berikut ini ditampilkan Tabel 3.2.1 sebagai pedoman sinkronisasi Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dengan Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto.

TABEL 3.2.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Penurunan Angka Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,75	5,62	5,42	5,09	4,76	4,43	4,10
		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70,00 (B)	70,00 (B)	70,50 (BB)	71,00 (BB)	71,50 (BB)	72,00 (BB)	72,50 (BB)
		Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Serta Penciptaan Perluasan Kesempatan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan Yang Berkualitas Dan Kompeten	85%	85%	85%	85%	87%	90%	90%
			Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	82%	82%	82%	84%	84%	85%	86%
		Meningkatnya Kondisi Hubungan Industrial Yang Harmonis, Dinamis Dan Kondusif Serta Optimalisasi Perlindungan Ketenagakerjaan	Persentase Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial Di Perusahaan		6%	6%	5%	5%	4%	4%
			Persentase Perusahaan Yang Mengikutsertakan Pekerja Dalam Jaminan Sosial		5%	5%	6%	6%	7%	8%

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan tupoksinya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Ketenagakerjaan. Dimana pada tahun 2024 mendatang diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di bidang Ketenagakerjaan.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024, sesuai rencana strategis dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto masih mengusung tema permasalahan penurunan angka pengangguran yang berkorelasi dengan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) maka dari itu adapun program dan kegiatan di bidang ketenagakerjaan dalam penanganan penekanan tingkat pengangguran terbuka harus tepat sasaran agar pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Mojokerto berhasil pada 5 (lima) tahun ke depan ini, Program, Kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana Permendagri RI Nomor 90 Tahun 2019, dan Permendagri RI Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, dapat dilihat sebagaimana pada Tabel TC – 33.

TABEL TC-33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN MOJOKERTO

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
	KETENAGAKERJAAN								
01.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	84,90 (A)	4.894.574.000	APBD	DANA TRANSFER UMUM	84,90 (A)	5.237.194.180
		Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan		1 Inovasi				1 Inovasi	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target		100%	17.500.000			100%	18.725.000
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	7.500.000			2 Dokumen	8.025.000
	RINCIAN :								
	Dokumen Rencana Kerja APBD			1 dokumen	3.750.000			1 dokumen	4.012.500
	Dokumen Rencana Kerja PAPBD			1 dokumen	3.750.000			1 dokumen	4.012.500
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	10.000.000			4 Laporan	10.700.000
	RINCIAN :								
	Penyusunan Dokumen Evaluasi tiap Tribulan			4 dokumen	3.380.000			4 dokumen	3.616.600
	Penyusunan Dokumen LKjIP			dokumen	3.350.000			dokumen	3.584.500

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Dokumen SAKIP			1 dokumen	3.270.000			1 dokumen	3.498.900
	Peningkatan kapasitas pengelolaan, ketersediaan data ketenagakerjaan dan kinerja OPD			1 kegiatan	-			1 kegiatan	-
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		90%	4.332.914.000			90%	4.636.217.980
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		36 Orang/bln	4.332.914.000			36 Orang/bln	4.636.217.980
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN			36 Org/bln	2.149.736.000			36 Org/bln	2.300.217.520
	Tambahan Penghasilan ASN (TPP)			36 Org/bln	1.736.288.400			36 Org/bln	1.857.828.588
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya ASN			36 Org/bln	88.740.000			36 Org/bln	94.951.800
	Pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Non ASN seluruh OPD dan Kecamatan			5527 Org/bln (12 bln)	358.149.600			5527 Org/bln (12 bln)	383.220.072
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		-- dokumen	-			-- dokumen	-
	RINCIAN :								
	Pembiayaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			-- dokumen	-			-- dokumen	-
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja		75%	-			75%	-
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		0 paket	-			0 paket	-
	RINCIAN :								

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembiayaan Pengadaan Pakaian Dinas			0 paket	-			0 paket	-
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum perangkat daerah sesuai kebutuhan		100%	128.160.000			100%	137.131.200
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		7 Paket	50.000.000			7 Paket	53.500.000
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7 paket	50.000.000			7 paket	53.500.000
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		7 paket	8.600.000			7 paket	9.202.000
	RINCIAN :								
	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat			7 paket	8.600.000			7 paket	9.202.000
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan		13 paket	20.000.000			13 paket	21.400.000
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Barang Cetak dan Penggandaan			13 paket	20.000.000			13 paket	21.400.000
1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan/ material yang disediakan		1 paket	16.960.000			1 paket	18.147.200
	RINCIAN :								
	Pembiayaan bahan/ material ATK			1 paket	16.960.000			1 paket	18.147.200

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		100 laporan	32.600.000			100 laporan	34.882.000
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Rapat Perjalanan Dinas			100 laporan	32.600.000			100 laporan	34.882.000
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan		100%	196.000.000			100%	209.720.000
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		12 Laporan	70.000.000			12 Laporan	74.900.000
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Jasa Komunikasi			12 bulan	6.218.806			12 bulan	6.654.122
	Pembiayaan Jasa Air				-				-
	Pembiayaan Jasa Listrik			12 bulan	63.781.194			12 bulan	68.245.878
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12 laporan	126.000.000			12 laporan	134.820.000
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Non ASN)			12 laporan	126.000.000			12 laporan	134.820.000
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam keadaan baik		100%	220.000.000			100%	235.400.000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		6 Unit	55.000.000			6 Unit	58.850.000
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor			6 Unit	50.000.000			6 Unit	53.500.000
	Pembiayaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Kantor			6 Unit	5.000.000			6 Unit	5.350.000
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		1 Unit	150.000.000			1 Unit	160.500.000
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Rehabilitasi gedung kantor			1 Unit	150.000.000			1 Unit	160.500.000
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		18 Unit	15.000.000			18 Unit	16.050.000
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor			18 Unit	15.000.000			18 Unit	16.050.000
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase program dan kegiatan yang mengacu perencanaan tenaga kerja	Kab. Mojokerto	100%	-	APBD	DANA TRANSFER UMUM	100%	-
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun		0 dokumen	-			0 dokumen	-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro		0 dokumen	-			0 dokumen	-
	RINCIAN :								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja			0 dokumen	-			0 dokumen	-
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	Kab. Mojokerto	30%	897.700.000	APBD	DANA TRANSFER UMUM	30%	960.539.000
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi		128 Orang	857.700.000			128 Orang	917.739.000
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n		128 orang	857.700.000			128 orang	917.739.000
	RINCIAN :								
	1 Pelatihan dan Sertifikasi Barista (K)			16 Orang	117.700.000			16 Orang	125.939.000
	2 Pelatihan dan Sertifikasi Las (K)			16 Orang	135.000.000			16 Orang	144.450.000
	3 Pelatihan dan sertifikasi cleaning service (K)			16 Orang	65.000.000			16 Orang	69.550.000
	4 Pelatihan dan sertifikasi Operator Alat Berat			16 Orang	120.000.000			16 Orang	128.400.000
	5 Pelatihan dan sertifikasi teknisi AC (K)			16 Orang	120.000.000			16 Orang	128.400.000
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial (Peningkatan Keterampilan kerja) (DBHCHT)		CUKAI (DBHCHT)						
	RINCIAN :								
	Pelatihan dan Sertifikasi Receptionist (DBHCHT) (K)			16 Orang	100.000.000			16 Orang	107.000.000
	Pelatihan dan sertifikasi Pemandu wisata (DBHCHT) (K)			16 Orang	100.000.000			16 Orang	107.000.000
	Pelatihan dan sertifikasi Pemijatan Refleksi (Reflexology) (DBHCHT) (K)			16 Orang	100.000.000			16 Orang	107.000.000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Ket (K) = Kompetensi / (D) = pelatihan skill kemampuan dan keahlian ketrampilan kerja dasar</i>								
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka optimaslisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n		0 Lembaga	-			0 Lembaga	-
	RINCIAN :								
	Pelatihan dan sertifikasi metodologi Instruktur LPK			0 Lembaga	-			0 Lembaga	-
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina		30 lembaga	40.000.000			30 lembaga	42.800.000
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina		30 lembaga	40.000.000			30 lembaga	42.800.000
	RINCIAN :								
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			15 LPK	20.000.000			15 LPK	21.400.000
	Pembinaan Pemagangan dalam Negeri			15 Perusahaan	20.000.000			15 Perusahaan	21.400.000
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan yang diberikan konsultasi produktivitas		4 perusahaan	-			4 perusahaan	-
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas		4 perusahaan	-			4 perusahaan	-
	RINCIAN :								
	Konsultasi Produktivitas Perusahaan Kecil			4 perusahaan	-			4 perusahaan	-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Informasi Lowongan Kerja yang Terpenuhi	Kab. Mojokerto	72%	340.000.000	APBD	DANA TRANSFER UMUM	72%	363.800.000
2.07.04.2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang tercapai sesuai target		100%	115.000.000			100%	123.050.000
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL		1 Orang	90.000.000			1 Orang	96.300.000
	RINCIAN :								
	Fasilitas Transmigrasi			1 Orang	90.000.000			1 Orang	96.300.000
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja		30 Orang	25.000.000			60 Orang	26.750.000
	RINCIAN :								
	Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)			30 Orang	25.000.000			60 Orang	26.750.000
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Fasilitas pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target		100%	175.000.000			100%	187.250.000
2.07.04.2.03.0003	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja		50 Orang	175.000.000			50 Orang	187.250.000
	RINCIAN :								
	Job Fair			40 stand	175.000.000			40 stand	187.250.000
	Penyuluhan informasi bursa kerja				-				-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI		20 Orang	50.000.000			20 Orang	53.500.000
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/ PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya		20 Orang	50.000.000			20 Orang	53.500.000
	RINCIAN :								
	Pembinaan Calon PMI (Pekerja Migran Indonesia)			20 Orang	50.000.000			20 Orang	53.500.000
TIDAK ADA DI KEPMENDAGRI TERBARU	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah orang peserta yang diberikan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA		0	-			0	-
TIDAK ADA DI KEPMENDAGRI TERBARU	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang Peserta yang Diberikan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA		0	-			0	-
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan		80%	3.221.192.000	APBD	DANA TRANSFER UMUM	80%	3.446.675.440
		Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial		56%				56%	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target		100%	3.221.192.000			100%	3.446.675.440

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah		4 Perkara	180.000.000			4 Perkara	192.600.000
	RINCIAN :								
	Sosialisasi Upah Minimum Kab. Mojokerto			60 Orang	30.000.000			60 Orang	32.100.000
	Pembinaan syarat kerja dan sistem outsourcing			30 Orang	50.000.000			30 Orang	53.500.000
	Harmonisasi Kelembagaan Hubungan Industrial			30 Orang	50.000.000			30 Orang	53.500.000
	Peningkatan Kinerja Dewan Pengupahan			3 Kegiatan	50.000.000			3 Kegiatan	53.500.000
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan		10 Perkara	25.000.000			10 Perkara	26.750.000
	RINCIAN :								
	Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial			10 Perkara	25.000.000			10 Perkara	26.750.000
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina		1 Lembaga	45.000.000			1 Lembaga	48.150.000
	RINCIAN :								
	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit			2 Kegiatan	45.000.000			2 Kegiatan	48.150.000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja		27970 Orang	2.971.192.000			27970 Orang	3.179.175.440
	RINCIAN :								
	Monitoring dan sosialisasi penggunaan pekerja perempuan dan anak			50 Orang	35.000.000			50 Orang	37.450.000
	Peningkatan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja			50 Orang	30.000.000			50 Orang	32.100.000
	Monitoring perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan			80 Orang	80.000.000			80 Orang	85.600.000
	Monitoring sarana dan prasarana di perusahaan			50 Orang	30.000.000			50 Orang	32.100.000
	Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan untuk petani tembakau dan Pekerja Rentan lainnya Melalui Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)			27740 Orang	2.796.192.000			27740 Orang	2.991.925.440
	JUMLAH				9.353.466.000				10.008.208.620

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bahwa Rencana Kerja dan Pendanaan perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan rekapitulasi rancangan akhir tahun 2024 yang memuat usulan program dan kegiatan Tahun 2024 kemudian disinkronisasikan melalui RKPD dengan pagu indikatif yang meliputi anggaran berbasis APBD dan APBD Provinsi sebagaimana terdapat pada Tabel 4.1.

TABEL 4.1
MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	13
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR												
	KETENAGAKERJAAN												
01.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,90 (A)	Kab. Mojokerto	4.894.574.000					
					Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	1 Inovasi							
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target		100%		17.500.000					
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen		7.500.000					
	RINCIAN :												
	Dokumen Rencana Kerja APBD					1 dokumen		3.750.000					
	Dokumen Rencana Kerja PAPBD					1 dokumen		3.750.000					
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan		10.000.000					
	RINCIAN :												
	Penyusunan Dokumen Evaluasi tiap Tribulan					4 dokumen		3.380.000					
	Penyusunan Dokumen LKjIP					dokumen		3.350.000					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	13
	Penyusunan Dokumen SAKIP					1 dokumen		3.270.000					
	Peningkatan kapasitas pengelolaan, ketersediaan data ketenagakerjaan dan kinerja OPD					1 kegiatan		-					
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		90%		4.332.914.000					
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		36 Orang/bln		4.332.914.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN					36 Org/bln		2.149.736.000					
	Tambahan Penghasilan ASN (TPP)					36 Org/bln		1.736.288.400					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya ASN					36 Org/bln		88.740.000					
	Pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Non ASN seluruh OPD dan Kecamatan					5527 Org/bln (12 bln)		358.149.600					
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		-- dokumen		-					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan admonistrasi Pelaksanaan Tugas ASN					-- dokumen		-					
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja		75%		-					
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		0 paket		-					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Pengadaan Pakaian Dinas					0 paket		-					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	13
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Penyediaan Administrasi Umum perangkat daerah sesuai kebutuhan		100%		128.160.000					
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		7 Paket		50.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					7 paket		50.000.000					
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		7 paket		8.600.000					
	RINCIAN :												
	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat					7 paket		8.600.000					
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		13 paket		20.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Barang Cetakan dan Penggandaan					13 paket		20.000.000					
1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan / Material			Jumlah paket bahan/ material yang disediakan		1 paket		16.960.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan bahan/ material ATK					1 paket		16.960.000					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	13
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		100 laporan		32.600.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Rapat Perjalanan Dinas					100 laporan		32.600.000					
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan		100%		196.000.000					
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		12 Laporan		70.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Jasa Komunikasi					12 bulan		6.218.806					
	Pembiayaan Jasa Air							-					
	Pembiayaan Jasa Listrik					12 bulan		63.781.194					
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12 laporan		126.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Non ASN)					12 laporan		126.000.000					
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik		100%		220.000.000					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	13
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		6 Unit		55.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor					6 Unit		50.000.000					
	Pembiayaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Kantor					6 Unit		5.000.000					
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		1 Unit		150.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Rehabilitasi gedung kantor					1 Unit		150.000.000					
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		18 Unit		15.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor					18 Unit		15.000.000					
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja				Persentase program dan kegiatan yang mengacu perencanaan tenaga kerja	100%	Kab. Mojokerto	-					
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun		0 dokumen		-					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	13
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro		0 dokumen		-					
	RINCIAN :												
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja					0 dokumen		-					
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja				Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	30%	Kab. Mojokerto	897.700.000					
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi		128 Orang		857.700.000					
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n		128 orang		857.700.000					
	RINCIAN :												
	Pelatihan dan Sertifikasi Barista (K)					16 Orang		117.700.000					
	Pelatihan dan Sertifikasi Las (K)					16 Orang		135.000.000					
	Pelatihan dan sertifikasi cleaning service (K)					16 Orang		65.000.000					
	Pelatihan dan sertifikasi Operator Alat Berat					16 Orang		120.000.000					
	Pelatihan dan sertifikasi teknisi AC (K)					16 Orang		120.000.000					
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial (Peningkatan Keterampilan kerja) (DBHCHT)						CUKAI (DBHCHT)						
	RINCIAN :												
	Pelatihan dan Sertifikasi Receptionist (DBHCHT) (K)					16 Orang		100.000.000					
	Pelatihan dan sertifikasi Pemandu wisata (DBHCHT) (K)					16 Orang		100.000.000					
	Pelatihan dan sertifikasi Pemijatan Refleksi (Reflexology) (DBHCHT) (K)					16 Orang		100.000.000					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	13
	<i>Ket (K) = Kompetensi / (D) = pelatihan skill kemampuan dan keahlian ketrampilan kerja dasar</i>												
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja			Jumlah kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka optimaslisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n		0 Lembaga		-					
	RINCIAN :												
	Pelatihan dan sertifikasi metodologi Instruktur LPK					0 Lembaga		-					
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina		30 lembaga		40.000.000					
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina		30 lembaga		40.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					15 LPK		20.000.000					
	Pembinaan Pemagangan dalam Negeri					15 Perusahaan		20.000.000					
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			Jumlah perusahaan yang diberikan konsultasi produktivitas		4 perusahaan		-					
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil			Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas		4 perusahaan		-					
	RINCIAN :												
	Konsultasi Produktivitas Perusahaan Kecil					4 perusahaan		-					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	13
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja				Persentase Informasi Lowongan Kerja yang Terpenuhi	72%	Kab. Mojokerto	340.000.000					
2.07.04.2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota			Persentase Fasilitas Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang tercapai sesuai target		100%		115.000.000					
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan Antar Kerja			Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL		1 Orang		90.000.000					
	RINCIAN :												
	Fasilitasi Transmigrasi					1 Orang		90.000.000					
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja			Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja		30 Orang		25.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)					30 Orang		25.000.000					
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			Persentase Fasilitas pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target		100%		175.000.000					
2.07.04.2.03.0003	Job Fair / Bursa Kerja			Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja		50 Orang		175.000.000					
	RINCIAN :												
	Job Fair					40 stand		175.000.000					
	Penyuluhan informasi bursa kerja							-					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	13
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI		20 Orang		50.000.000					
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			Jumlah CPMI/ PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya		20 Orang		50.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembinaan Calon PMI (Pekerja Migran Indonesia)					20 Orang		50.000.000					
TIDAK ADA DI KEPMENDAGRI TERBARU	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah orang peserta yang diberikan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA		0		-					
TIDAK ADA DI KEPMENDAGRI TERBARU	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah Orang Peserta yang Diberikan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA		0		-					
2.07.05	Program Hubungan Industrial				Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	80%		3.221.192.000					
					Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial	56%							
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota			Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target		100%		3.221.192.000					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	13
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah Perselisihan yang dicegah		4 Perkara		180.000.000					
	RINCIAN :												
	Sosialisasi Upah Minimum Kab. Mojokerto					60 Orang		30.000.000					
	Pembinaan syarat kerja dan sistem outsourcing					30 Orang		50.000.000					
	Harmonisasi Kelembagaan Hubungan Industrial					30 Orang		50.000.000					
	Peningkatan Kinerja Dewan Pengupahan					3 Kegiatan		50.000.000					
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan		10 Perkara		25.000.000					
	RINCIAN :												
	Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial					10 Perkara		25.000.000					
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah LKS Tripartit yang dibina		1 Lembaga		45.000.000					
	RINCIAN :												
	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit					2 Kegiatan		45.000.000					
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja		27970 Orang		2.971.192.000					
	RINCIAN :												

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	13
	Monitoring dan sosialisasi penggunaan pekerja perempuan dan anak					50 Orang		35.000.000					
	Peningkatan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja					50 Orang		30.000.000					
	Monitoring perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan					80 Orang		80.000.000					
	Monitoring sarana dan prasarana di perusahaan					50 Orang		30.000.000					
	Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan untuk petani tembakau dan Pekerja Rentan lainnya Melalui Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)					27740 Orang		2.796.192.000					
	JUMLAH							9.353.466.000					

BAB V

PENUTUP

a. Catatan Penting

Rencana kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan rencana kerja tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2024 yang akan datang.

b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Bahwa pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada dokumen Rencana kerja Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, dan Rencana Strategis OPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto 2021-2026.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 telah disesuaikan dengan kondisi Renstra 2021-2026 karena Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan.

Mojokerto, Juli 2023


KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO,
BAMBANG PURWANTO, SH., MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690521 199602 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS TENAGA KERJA
JL. PEMUDA NO. 55A MOJOSARI, MOJOKERTO 61382 JAWA TIMUR
TELP. (0321) 592192 FAX. (0321) 593581

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO**

NOMOR 188.45/ 15 /KEP/416-107/2023

TENTANG

**RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, Maka setiap Organisasi Perangkat Daerah perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto tentang Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto

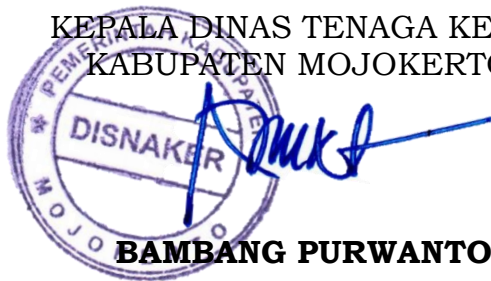
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2024
- KEDUA** : Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu memuat visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan, dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara berkesinambungan dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan ke II Tahun berkenaan
- BAB III : Tujuan dan sasaran
- BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- BAB V : Penutup
- LAMPIRAN
- KETIGA** : Uraian Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 31 Juli 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO,



BAMBANG PURWANTO

Matriks Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

[illegible]

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
									SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK
				5	6				7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	13
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		90%		4.332.914.000					
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		36 Orang/bln		4.332.914.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN					36 Org/bln		2.149.736.000					
	Tambahan Penghasilan ASN (TPP)					36 Org/bln		1.736.288.400					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya ASN					36 Org/bln		88.740.000					
	Pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Non ASN seluruh OPD dan Kecamatan					5527 Org/bln (12 bln)		358.149.600					
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah dokumen hasil penyediaan admnistrasi pelaksanaan tugas ASN		-- dokumen		-					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan admonistrasi Pelaksanaan Tugas ASN					-- dokumen		-					
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja		75%		-					
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		0 paket		-					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Pengadaan Pakaian Dinas					0 paket		-					
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Penyediaan Administrasi Umum perangkat daerah sesuai kebutuhan		100%		128.160.000					
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		7 Paket		50.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					7 paket		50.000.000					
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		7 paket		8.600.000					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	13
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			Persentase Fasilitasi pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target		100%		175.000.000					
2.07.04.2.03.0003	Job Fair / Bursa Kerja			Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja		50 Orang		175.000.000					
	RINCIAN :												
	Job Fair					40 stand		175.000.000					
	Penyuluhan informasi bursa kerja							-					
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI		20 Orang		50.000.000					
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			Jumlah CPMI/ PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya		20 Orang		50.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembinaan Calon PMI (Pekerja Migran Indonesia)					20 Orang		50.000.000					
TIDAK ADA DI KEPMENDAGRI TERBARU	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah orang peserta yang diberikan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA		0		-					
TIDAK ADA DI KEPMENDAGRI TERBARU	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah Orang Peserta yang Diberikan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA		0		-					
	RINCIAN :												
	Pengembangan kemampuan dan ketrampilan personalia dan pendamping TKA					0		-					
2.07.05	Program Hubungan Industrial				Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	80%		3.221.192.000					
					Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial	56%							

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	13
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota			Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target		100%		3.221.192.000					
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah Perselisihan yang dicegah		4 Perkara		180.000.000					
	RINCIAN :												
	Sosialisasi Upah Minimum Kab. Mojokerto					60 Orang		30.000.000					
	Pembinaan syarat kerja dan sistem outsourcing					30 Orang		50.000.000					
	Harmonisasi Kelembagaan Hubungan Industrial					30 Orang		50.000.000					
	Peningkatan Kinerja Dewan Pengupahan					3 Kegiatan		50.000.000					
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan		10 Perkara		25.000.000					
	RINCIAN :												
	Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial					10 Perkara		25.000.000					
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah LKS Tripartit yang dibina		1 Lembaga		45.000.000					
	RINCIAN :												
	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit					2 Kegiatan		45.000.000					
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja		27970 Orang		2.971.192.000					
	RINCIAN :												
	Monitoring dan sosialisasi penggunaan pekerja perempuan dan anak					50 Orang		35.000.000					
	Peningkatan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja					50 Orang		30.000.000					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
									SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK
				OUTPUT	OUTCOME								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	13
	Monitoring perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan					80 Orang		80.000.000					
	Monitoring sarana dan prasarana di perusahaan					50 Orang		30.000.000					
	Pertindungan Sosial Ketenagakerjaan untuk petani tembakau dan Pekerja Rentan lainnya Melalui Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)					27740 Orang		2.796.192.000					
	JUMLAH							9.353.466.000					

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO,



BAMBANG PURWANTO